

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM, maka kesimpulan yang diperoleh antara lain:

1. Implementasi kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan mengikuti alur pelaksanaan proses penganggaran berbasis kinerja sesuai aturan. Akan tetapi masih terdapat kendala di dalam beberapa tahapan-tahapan kebijakan, antara lain masih kurang memadainya infrastruktur (fasilitas) pendukung dan sumber daya manusia pelaksana yang cenderung kelebihan beban kerja sehingga tidak maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan.
2. Tujuan diterapkannya kebijakan anggaran berbasis kinerja di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM belum sepenuhnya tercapai. Indikator kinerja hingga penelitian ini dilakukan belum jelas dan terstruktur dengan baik. Akan tetapi dari segi pelaksanaan teknis, sudah berjalan dengan acuan dari kebijakan serupa di Departemen Keuangan.
3. Penerapan sistem penganggaran yang lebih responsif dengan pendekatan penganggaran jangka menengah, *unified budget* dan anggaran berbasis kinerja dalam implementasinya di lapangan banyak menemui kendala. Oleh karena itu di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM, implementasinya dilakukan secara bertahap mengikuti kesiapan seluruh elemen organisasi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Departemen Hukum dan HAM harus mengoptimalkan struktur birokrasi yang ada tanpa perlu melakukan perubahan struktur lagi, yang perlu diefektifkan adalah tugas pokok dan fungsi serta koordinasi dan komunikasi antar unit kerja sebagaimana yang telah diputuskan oleh Menteri Hukum dan HAM.

2. Berkaitan dengan kendala yang timbul, semua alokasi anggaran untuk kegiatan pemerintah harus dilaksanakan secara efisien dan efektif. Koordinasi antara unit perlu ditingkatkan untuk menghindari duplikasi kegiatan yang sama. Diperlukan juga komitmen yang sangat kuat oleh semua pihak yang terlibat di proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Khusus untuk penyediaan fasilitas dan insentif, diperlukan upaya penghematan tanpa mengurangi kenyamanan pegawai dalam bekerja.

